

Komparasi Penerapan Ideologi Negara Indonesia dan Malaysia (Ideologi Pancasila dalam PPKn dan Ideologi Rukun Negara dalam PSK)

Destiara Ramadhania

Email: destiararamadhania@gmail.com

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Rahesha Maharani

Email: raheshamhrn411@gmail.com

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Pendahuluan

Eskalasi peradaban dunia sangatlah signifikan baik dari segi pendidikan, budaya, sosial dan sarana informasi. Menjelajahi berbagai negara, tidaklah harus berkeliling dunia untuk dapat mengetahui keanekaragaman suatu bangsa, melalui teknologi informasi dan komunikasi memberikan kemudahan untuk seluruh lapisan masyarakat tanpa harus bertatap muka. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi ini tentunya membantu terciptanya kehidupan yang lebih efisien dan dinamis, hal lain yang berdampak positif adalah perkembangan ilmu pengetahuan untuk dapat mengenal budaya antar negara dan juga mempelajari berbagai aspek seperti ekonomi, politik dan sosial. Namun, disisi lain perkembangan teknologi juga menimbulkan dampak negatif pula dalam pembentukan nilai-nilai moral dan pemahaman kebangsaan atau sikap nasionalisme bagi masyarakat suatu negara, terutama pada anak usia dini yang masih perlu pengawasan orang tua.

Anak sebagai insan yang sedang memasuki tahap tumbuh dan berkembang, baik secara fisik, mental dan juga intelektualnya. Pada masa pertumbuhannya tersebut setiap anak sedang berusaha untuk mengenal nilai-nilai yang berlaku di lingkungan masyarakat dan mempelajarinya dengan melihat dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari untuk meyakini sebagai bagian dari dirinya. Menyikapi hal ini, banyak pihak yang bergerak khususnya di kalangan pendidikan menyampaikan pentingnya diterapkan pendidikan mengenai kewarganegaraan sebagai solusi untuk menyikapi permasalahan penyimpangan nilai-nilai moral yang terjadi karena dampak kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Pertanyaannya adalah mengapa harus melalui Pendidikan Kewarganegaraan? Salah satu fungsi Pendidikan Kewarganegaraan adalah pembentukan sikap dan karakter, Pendidikan Kewarganegaraan bertanggung jawab dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan, menanamkan disiplin sosial. Oleh karena itu, perlu dilaksanakan pendidikan yang mengembangkan nilai-nilai moral yang baik pada diri anak, pendidikan adalah kehidupan sebab pada nantinya anak akan terbiasa menerapkan perilaku yang positif dalam kehidupannya dan di lingkungan masyarakat.

Keseluruhan tujuan tersebut di atas merupakan modal utama untuk ikut berpartisipasi aktif sebagai warga negara yang baik dalam menjaga harkat dan martabat bangsa di mata dunia. Mengingat esensi pendidikan kewarganegaraan dalam mewujudkan warga negara yang baik, maka pendidikan kewarganegaraan menjadi kurikulum yang penting di banyak negara. Lahirnya pendidikan kewarganegaraan di Indonesia tidak terlepas dari perkembangan dan

sejarah, Indonesia mengalami beberapa perubahan sistem pendidikan sejak era kolonialisme. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, hanya kaum bangsawan yang dapat mengikuti pendidikan. Pendidikan kewarganegaraan pada era pasca kolonialisme pun berkembang semakin kompleks dan dinamis. Pada awal kemerdekaan, upaya untuk membangun karakter yang dikenal dengan pembangunan karakter bangsa yang dicetus oleh Soekarno untuk membangkitkan mental bangsa yang merasa masih rendah akibat penjajahan.¹ Pendidikan kewarganegaraan dianggap penting untuk membangkitkan jiwa nasionalisme dalam rangka membangun negara yang berdaulat, dalam pendidikan kewarganegaraan juga menjelaskan ideologi suatu negara, tentunya di Indonesia ideologi negaranya adalah Pancasila. Pancasila sangat penting bagi eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Urgensi pendidikan kewarganegaraan makin terasa untuk membentuk generasi muda Indonesia yang memiliki wawasan kebangsaan, cinta tanah air dan menjadi warga negara yang baik, maka dari itu terbentuklah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).

Selain Indonesia, Malaysia juga dikenal sebagai salah satu negara yang multi etnik. Ada tiga etnis utama yang mendiami Malaysia, yaitu Melayu, China, dan India. Latar belakang Malaysia sebagai negara dengan masyarakat majemuk sudah berlangsung sejak era kolonialisme Inggris. Dengan berbagai perbedaan tersebut pendidikan kewarganegaraan diperlukan untuk menciptakan keharmonisan dalam masyarakat. Pendidikan kewarganegaraan secara resmi dimulai pada tahun 1972 dengan nama Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (PSK). Kurikulum Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan di Malaysia bermuatan nilai-nilai multikulturalisme dan nasionalisme sebagai upaya untuk memelihara persatuan dalam keberagaman yang ada dalam masyarakat.² Tentunya dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan juga mempelajari ideologi negara, ideologi negara Malaysia adalah Rukun Negara yang tentunya sebagai pegangan dan pedoman bangsa untuk menumbuhkan sikap nasionalisme pada negara.

Pendidikan kewarganegaraan kedua negara bertetangga dan beretnis Melayu ini tidak lepas dari sejarah panjang keduanya. Baik Indonesia maupun Malaysia merupakan negara yang mengalami masa kolonialisasi. Indonesia dijajah oleh Belanda dan Jepang sebelum memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Sementara, Malaysia melepaskan diri dari jajahan Inggris pada 31 Agustus 1957. Mempertimbangkan hal tersebut, menarik untuk dikaji bagaimana konsep, strategi, dan metode negara-negara di dunia melaksanakan pendidikan kewarganegaraan berdasarkan ideologi negaranya untuk membentuk sikap nasionalisme generasi muda mereka. Perbandingan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia dan Malaysia dengan melihat dari ideologi kedua negara tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji perkembangan pendidikan kewarganegaraan kedua negara. Dengan berfokus pada komparasi pendidikan kewarganegaraan kedua negara ini, maka akan terlihat bagaimana persamaan dan perbedaan dipengaruhi oleh kondisi historis yang berbeda. Dalam tulisan ini, kajian yang dipilih adalah komparasi penerapan ideologi Negara Indonesia dan Malaysia dengan mengkaji ideologi Pancasila dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dan ideologi Rukun Negara dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (PSK).

¹ Hendra Priazki Hajri, "Kajian Komparasi Dinamika Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia dan Malaysia", *Jurnal Foundasia*, Vol. 14, No. 1, 2023, hal. 43.

² *Ibid*, hal. 44.

Sehingga rumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah bagaimana komparasi ideologi Pancasila dan ideologi Rukun Negara serta bagaimana penerapan kedua ideologi tersebut dalam Pendidikan Kewarganegaraan (PPKn) dan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (PSK).

Pembahasan

Konsep Ideologi Pancasila di Indonesia dan Ideologi Rukun Negara di Malaysia

Konsep dasar pembentukan suatu bangsa dan negara tentunya berasal dari ideologi yang diyakininya, ideologi yang dianggap mewakili cara hidup masyarakatnya berbeda-beda antara satu negara dengan negara lainnya, hal ini ditentukan oleh sejarah berdirinya bangsa dan karakteristik pemerintahan itu sendiri. Setiap negara tentu mempertahankan ideologinya untuk melindungi bangsa agar tidak terpecah belah dan memiliki sifat nasionalisme terhadap negara. Masyarakat yang mengakui dan telah meyakini ideologi negaranya akan mewujudkannya dalam sikap dan tindakan perilaku kehidupannya sehari-hari.

Indonesia memiliki ideologi yaitu Pancasila, Pancasila yang lahir secara resmi pada tahun 1945 tidak hanya ditempatkan sebagai landasan falsafah negara, tetapi juga sebagai format ideologi bangsa yang berfungsi menjaga keseimbangan dan menjamin keberagaman. Pancasila dalam etimologis berasal dari bahasa sansekerta yaitu panca yang berarti lima, serta syila yang berarti dasar. Sehingga, Pancasila merupakan lima dasar negara yang dijadikan sebagai pedoman hidup dalam berperilaku di kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia adalah: 1) Pancasila adalah dasar negara dan sumber dari sumber hukum negara, 2) Pancasila mencakup tujuan negara yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 3) Terdapat cita-cita hukum dan norma-norma atau nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam melaksanakan hukum dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan sebaik-baiknya.³ Adapun isi dari Pancasila yaitu: “1) Ketuhanan Yang Maha Esa, 2) Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, 3) Persatuan Indonesia, 4) Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Pemusyawaratan/Perwakilan, 5) Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

Pancasila adalah ideologi terbuka, yang bersifat orisinal, dari kelima sila tersebut dapat kita lihat bahwa Pancasila bersifat universal dan memuat cita-cita luhur bangsa Indonesia. Pancasila dapat menjadi penuntun generasi-generasi bangsa untuk melanjutkan cita-cita pahlawan Indonesia. Hal ini penting karena banyaknya pengaruh negara asing yang masuk ke Indonesia. Bangsa Indonesia harus mempunyai pandangan hidup (*way of life*) yang jelas. Kedudukan Pancasila sangat penting, diantaranya sebagai dasar negara, pedoman hidup masyarakat Indonesia dalam segala aspek kehidupan terutama dalam berbangsa, dan bernegara serta sebagai ideologi bangsa Indonesia. Dari pandangan itu akan mempermudah kita untuk tetap berperilaku yang baik sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa agar tidak terombang-ambing dengan pengaruh negara lain.⁴ Sebagai bangsa negara yang baik, kita dapat menjaga keutuhan

³ Teuku Muharam Rizqullah & Fatma Ulfatum Najicha, “Pengimplementasian Ideologi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara”, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6, No. 2, 2022, hlm. 2632.

⁴ Widiatama, *dkk*, “Ideologi Pancasila Sebagai Dasar Membangun Negara Hukum Indonesia”, *Jurnal USM Law Review*, Vol. 3, No. 2, 2020, hlm. 319.

Pancasila dengan cara mengimplementasikan yang terkandung di dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Ideologi Rukun Negara sebagai ideologi negara Malaysia dibentuk karena terjadinya tragedi kelam pada 13 Mei 1969 berdasarkan pula pada nilai agama oleh masyarakat Malaysia. Peristiwa 13 Mei 1969 telah membuka pemikiran seluruh bangsa di Malaysia akan pentingnya sifat menghargai satu sama lain yang meliputi rasa hormat antar budaya, agama, dan latar belakang adat kepercayaan setiap bangsa, baik dari etnik dan juga warna kulit. Pada akhirnya masyarakat Malaysia sepakat akan dasar nasionalisme negara melalui ideologi nasional yaitu Rukun Negara sebagai semangat bangsa dan sebagai kekuatan sebuah negara yang bukan hanya dinilai dari kekuatan tentara dan polisi saja, tetapi bergantung pada semangat dan jiwa rakyatnya.⁵ Rukun Negara merupakan pegangan dan pedoman hidup bagi rakyat Malaysia, Rukun Negara tentunya perlu diyakini dan dijadikan acuan oleh rakyat Malaysia karena Rukun Negara dibentuk mengikuti kebiasaan masyarakat Malaysia dan benar bahwa rukun negara bertujuan untuk memperkokuh ketahanan dan keamanan negara.

Ideologi Rukun Negara yang disusun pada tahun 1971 telah dijadikan sebagai teras utama negara Malaysia atas ketegangan hubungan sesama, khususnya melibatkan etnik Melayu dan China. Rukun Negara dirumuskan berdasarkan kesepakatan dalam Majlis Gerakan Negara (MAGERAN), Rukun Negara merupakan ideologi dan identitas seluruh warga Malaysia yang terikat dengan keberagaman. Rukun Negara hadir sebagai upaya memperkuat integrasi dan membawa nasionalisme warga negara. Lima prinsip Rukun Negara yang diwujudkan sebagai ideologi negara terbentuk berdasarkan kondisi sosial masyarakat Malaysia dengan keberagaman suku, ras, dan agama. Prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Rukun Negara bertujuan terutama untuk memperkuat persatuan etnis.⁶ Adapun prinsip-prinsip tersebut yaitu: “1) Kepercayaan Kepada Tuhan, 2) Kesetiaan Kepada Raja dan Negara, 3) Keluhuran Perlembagaan, 4) Kedaulatan Undang-Undang, 5) Kesopanan dan Kesusilaan”.

Unsur-unsur Rukun Negara ini juga telah dimasukkan dalam kurikulum pendidikan. Hal ini untuk mewujudkan perpaduan antar masyarakat majemuk di Malaysia. Selain itu nilai-nilai dalam Rukun Negara juga untuk mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakat, untuk memelihara hidup yang demokratis, memahami antara satu sama lain dari kalangan masyarakat berbagai tradisi, kebudayaan dan agama yang berbeda.

Penerapan Ideologi Pancasila di Indonesia dan Ideologi Rukun Negara di Malaysia

Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, “Pendidikan adalah suatu usaha yang disadari dan disusun dalam mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif dalam mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan pada dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.” Melihat pengertian tersebut, bahwasannya dengan menciptakan suasana belajar yang tersusun menimbulkan kenyamanan dan pembentukan karakter oleh peserta didik yang mengerti mengenai agama, ilmu-ilmu pengetahuan, dan lain

⁵ Hadijah Johari & Dawam M. Rohmatulloh, “Persepsi Terhadap Konsep Rukun Negara Melalui Pengajaran Kursus Pengajian Malaysia”, *Persidangan Antar Bangsa Sains Sosial dan Kemanusiaan (Pasak)*, 2019, hlm. 2.

⁶ Arik Dwijayanto, “Pancasila and Rukun Negara: A Relation of Identity, State, and Nationalism in Indonesia and Malaysia”, *Tebuireng Journal of Islamic Studies and Society*, Vol. 2, No. 2, 2021, hlm. 49.

sebagainya. Namun, ada akan hal penting bahwa para peserta didik sebagai generasi yang akan meneruskan generasi sebelumnya harus dibenahi dengan pendidikan kewarganegaraan.

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang ada dalam kurikulum 2006, yang kemudian dikemas dan disempurnakan dalam mata pelajaran yang mencakup pembahasan lebih luas yaitu mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN).⁷ PPKn merupakan mata pelajaran memiliki visi dan misi yang bertujuan untuk mengembangkan para peserta didik agar menjadi warga negara yang cerdas, baik dalam segi toleransi, hak kemanusiaan, demokrasi, dan bertanggung jawab untuk bangsa dan negara Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Menurut Margaret Stimman Branson (1998), kompetensi utama dari pendidikan kewarganegaraan terdiri dari tiga hal, antara lain yaitu “*civic knowledge, civic skills, dan civic dispositions*”. *Civic knowledge* mengenai apa yang harus diketahui oleh warga negara, *civic skills* mengenai cakupan keterampilan warga negara, seperti keterampilan pengetahuan dan keterampilan partisipasi, sedangkan *civic dispositions* mengenai karakter privat dan karakter publik masyarakat.⁸

Esensi dari adanya pendidikan kewarganegaraan yaitu ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila sebagai dasar negara mempunyai konsepsi dalam menata pendidikan, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu peran Pancasila sangat penting pada konsepsi pendidikan di Indonesia untuk pembentukan dan pengembangan karakter peserta didik yang memuat pada kelima sila Pancasila serta mengharapkan agar peserta didik dalam berperilaku mengacu kepada norma.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yaitu memunculkan dan meningkatkan peserta didik akan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki pribadi yang baik dalam kehidupan bermasyarakat seperti menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, mengutamakan kepentingan bersama, memiliki jiwa patriot, memperkuat cinta tanah air, dan solidaritas yang tinggi. Karena Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan berpacu pada Pancasila, maka penerapan ideologi Pancasila dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sesuai kelima nilai Pancasila dibawah ini:

1. Sila Pertama

Sila pertama yang berbunyi, “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Implementasi atas sila pertama ini, biasanya para pengajar peserta didik memberikan pengajaran mengenai membiasakan budaya salam, menunaikan ibadah, dan memberikan pengetahuan mengenai saling toleransi antara umat beragama lain. Biasanya di sekolah-sekolah sudah diterapkan sholat dhuha dan sholat dzuhur berjamaah untuk yang bergama Islam dan melakukan pembelajaran bagi yang bergama Non Islam. Melihat hal ini akan menimbulkan rasa toleransi tinggi peserta didik untuk tidak saling mengganggu satu dengan yang lainnya.

2. Sila Kedua

⁷ Julia Bea Kurniawaty, “Penerapan Nilai Pancasila dalam Proses Pembelajaran di Sekolah Dasar”, *Jagaddhita: Jurnal Kebhinekaan dan Wawasan Kebangsaan*, Vol. 1, No. 2, 2022, hal. 24

⁸ Didik Baehaqi Arif, “Pengembangan Komponen Kompetensi Kewarganegaraan Dalam Buku Teks Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs”, *Jurnal Civics*, Vol. 13, No. 1, 2016, hal. 48

Sila Kedua yang berbunyi, “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab”. Implementasi atas sila kedua ini, para peserta didik diberikan pengajaran untuk bersikap sopan santun, memiliki sikap tenggang rasa, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, mengembangkan sikap hormat dan saling menghormati tanpa membeda-bedakan sesama. Misalnya tidak melakukan perundungan terhadap peserta didik lain apabila memiliki perbedaan diantara peserta didik lain, menghormati guru dan kakak kelas dan menyayangi adik kelas dan teman sebaya.

3. Sila Ketiga

Sila Ketiga yang berbunyi, “Persatuan Indonesia”. Implementasi atas sila ketiga ini, para peserta didik biasanya dilakukan dalam upacara dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan di setiap kelas di pajang foto Burung Garuda, Presiden, dan Wakil Presiden. Selain itu dalam pembelajaran, biasanya para pengajar peserta didik memberikan kuis mengenai keberagaman Indonesia, pahlawan Indonesia, dan mengenal budaya-budaya Indonesia yang akan membantu karakter nasionalisme dan cinta tanah air.

4. Sila Keempat

Sila Keempat yang berbunyi, “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan”. Implementasi atas sila keempat ini, biasanya para pengajar peserta didik memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk memberikan pendapat mereka sendiri, seperti dalam menentukan struktur kelas. Biasanya para peserta didik diberikan kebebasan untuk mengajukan diri atau mengusulkan nama temannya untuk menjadi pengurus kelas. Pengimplementasian sila keempat ini bertujuan agar peserta didik mengenal demokrasi dan musyawarah mufakat dengan membiasakan untuk memberikan kebebasan berpendapat.

5. Sila Kelima

Sila kelima yang berbunyi, “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Implementasi atas sila kelima ini, biasanya para pengajar peserta didik memberikan pengajaran dengan harus bersikap adil atas sesame tanpa membedakan suku, ras, dan budaya. Misalnya dalam pertemanan harus saling berbagi satu sama lain tanpa membeda-bedakan latar belakang orang lain.

Berdasarkan falsafah pendidikan kewarganegaraan Malaysia, pendidikan merupakan upaya yang searah untuk mengembangkan potensi seseorang secara keseluruhan dan terpadu yang akan melahirkan pribadi yang harmonis dari segala aspek, seperti intelektual, rohani, emosional, dan jasmani, yang berdasarkan ketaatan kepada Tuhan.⁹ Salah satu pendidikan yang ada di Malaysia yaitu Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (PSK), yang merupakan salah satu mata pelajaran yang berdasarkan kurikulum Malaysia yang menekankan aspek nilai dasar dan semangat patriotisme kepada siswa sebagai warga negara Malaysia dalam bertanggung jawab dengan memahami pengetahuan sivik, kemahiran sivik, dan nilai sivik.

Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memiliki tujuan untuk menciptakan generasi yang memiliki rasa empati tinggi terhadap negara. Selain itu, Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan menerapkan empat metode, yaitu belajar untuk mengetahui (*learning to do*), belajar untuk bertindak (*learning to do*), belajar untuk hidup

⁹ Kementerian Pelajaran Malaysia, Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan.

bersama (*learning to know*), dan belajar untuk membentuk pribadi (*learning to be*). Berkaitan dengan ini, maka pihak sekolah harus menjamin dan bertanggung jawab dalam pembinaan untuk semua murid terhadap pengetahuan yang berkaitan dengan kewarganegaraan. Para murid juga ditekankan untuk berpikir kritis dan kreatif agar sadar dalam membangun jiwa patriotism untuk pembangunan negara.

Terdapat tiga objek mata pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewargaegaraan, yaitu objek pengetahuan, kemahiran, dan nilai. Pada objek pengetahuan, para murid dikenali mengenai kepribadiannya, serta peranan dan tanggung jawab individu terhadap masyarakat dan negara. Selain itu mendapatkan pengajaran mengenai keagamaan, tradisi, dan kebudayaan. Sedangkan dalam objek kemahiran, para murid diberikan pengajaran mengenai kedisiplinan diri, berinteraksi dengan sesama warga negara, dan melakukan aktivitas dalam pembangunan masyarakat dan negara. Dalam objek nilai, para murid diberikan pengajaran mengenai kepedulian terhadap sesama anggota masyarakat dalam mensejahterakan kepentingan bersama serta rela berkorban terhadap negara.

Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan berorientasi kepada Rukun Negara sebagai ideologi Negara Malaysia. Pada prinsipnya, Rukun Negara ini memberikan keterpanduan dari segala aspek, seperti sosial, ekonomi, dan politik. Menurut Nazaruddin Hj. Mohd Jali *et al.* (2003), menjelaskan terdapat lima prinsip yang menjadi tanggung jawab rakyat Malaysia berdasarkan Ketuhanan dan seluruh alam semesta.¹⁰ Rahasia kesempurnaan Rukun Negara terletak pada pengamalannya. Tanpa praktik, Rukun Negara akan menjadi sebuah dokumen yang tidak berguna dan tidak ada artinya. Hal tersebut penting, karena Rukun Negara bukan hanya dipahami oleh setiap warga negara, namun juga diamalkan bersama sepenuhnya, dan segala hikmah yang terkandung di baliknya setiap kata dan kalimat. Maka, Rukun Negara ini perlu dipahami, dihayati, dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari oleh warga negara Malaysia.

1. Kepercayaan kepada Tuhan

Dengan memegang dan berpedoman terhadap agama, maka dapat membentuk kepribadian individu yang religious. Dalam kehidupan manusia sangat penting menanamkan nilai agama, hal ini menjadi pilar utama Rukun Negara. Semua perilaku didasarkan pada nilai-nilai religious hingga akhirnya penghayatannya mampu diterjemahkan ke dalam setiap aktivitas kehidupan. Dalam mengimplementasikan kepercayaan kepada Kesetiaan kepada Raja dan Negara

Persatuan suatu bangsa dibangun melalui kesetiaan terkait dengan para pemimpin dan negara. Di Malaysia, Pertuan Agong merupakan Kepala Negara yang mengawasi segala aspek sudut masyarakat, yang merupakan garis keturunan raja-raja Melayu ditingkat negara maka dijadikan simbol persatuan rakyat. Setiap warga negara perlu menunjukkan kesetiaan penuh kepada Pemerintahan Yang Mulia. Dalam pengimplementasian kesetiaan kepada Raja dan Negara, yaitu dengan memberikan pengajaran dengan memperkenalkan Kepala Negara, Perdana Menteri, dan sistem pemerintahan yang ada di Malaysia serta menghormati dan menjunjung tinggi Kepala Negara.

¹⁰ Lee Yok Fee & Sarjit S. Gill, "Rukun Negara Teras Pembinaan Modal Insan: Satu Komentari", *Partanika J. Soc. Sci. & Hum*, Vol. 16, No, 1, 2008, Hal. 111

2. Keluruhan Perlembagaan

Konstitusi sebagai sumber referensi utama dan hukum tertinggi bagi negara. Konstitusi berfungsi untuk melindungi hak dan keistimewaan setiap warga negara serta mendorong tata kelola di tingkat federal dan negara bagian. Konstitusi disusun dan disetujui melalui konsensus oleh setiap ras di Malaysia perlu dihormati dan dipertahankan. Peran konstitusi sebagai jaminan kontrak sosial yang tidak perlu dipertanyakan lagi keselarasan dan keselarasan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini, orientasi prinsip Keluruhan Perlembagaan yaitu warga negara dapat mematuhi perlembagaan negara, perlembagaan ini memberikan perlindungan, terjaminnya hak asasi manusia, dan hak kerakyatan.

3. Kedaulatan Undang-Undang

Kekuasaan pemerintahan terbagi menjadi Lembaga Legislatif, Lembaga Eksekutif, dan Lembaga Yudikatif. Undang-undang berperan dalam membangun suatu bangsa yang beradab, tertib, dan disiplin. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlakuan yang adil. Oleh karena undang-undang berkedudukan tinggi, maka warga negara wajib mematuhi undang-undang. Dalam hal pengimplementasian prinsip Kedaulatan undang-undang ini, para murid diberikan pengajaran bagaimana kedudukan undang-undang, bagaimana fungsi undang-undang, dan mengapa kita sebagai warga negara harus mematuhi peraturan undang-undang yang ada di negara.

4. Kesopanan dan Kesusilaan

Pada prinsip ini menekankan tanggung jawab individu untuk berakhlak mulia dan bertingkah laku yang baik dalam berhubungan dengan individu yang lain, memiliki sikap disiplin dan menghormati sesama.

Kesimpulan

Indonesia dan Malaysia merupakan gambaran keberagaman yang tepat dimana keberagaman suku, bahasa, dan agama bisa dipersatukan dalam bentuk yang ideal. Keberagaman ini mau tidak mau menunjukkan bahwa tidak ada satu pun kelompok masyarakat yang mengabaikan eksistensi politiknya. Keberagaman bukan berarti semua menjadi tercampur dan kehilangan jati diri. Keberagaman negara Indonesia dan Malaysia memungkinkan dan seharusnya menuntut agar setiap kelompok masyarakat dapat menjaga identitasnya masing-masing sekaligus dapat hidup berdampingan secara harmonis dengan kelompok masyarakat lainnya. Komitmen mereka untuk membangun hidup berdampingan secara sosial, politik, dan budaya secara damai dan penuh hormat sebagai rekan senegara sangat terlihat jelas melalui ideologi masing-masing yang dianutnya yaitu Pancasila dan Rukun Negara. Pendidikan mengenai kesadaran identitas nasional sangat penting diberlakukan di setiap negara, seperti di Indonesia terdapat mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dan di Malaysia terdapat mata pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (PSK). Kedua mata pelajaran ini sebenarnya memiliki hakikat yang sama yaitu menciptakan generasi penerus bangsa patuh terhadap ketentuan Tuhan, memiliki rasa toleransi yang tinggi, memiliki rasa tanggung rasa yang tinggi, serta berjiwa nasionalisme yang berpedoman pada ideologi masing-masing negara agar identitas negara tidak terabaikan dari generasi ke generasi. Pancasila dan Rukun Negara pada akhirnya dapat menjadi identitas nasional dan semangat dalam membentuk nasionalisme warga negara di Indonesia dan Malaysia

Daftar Pustaka

- Arif, Didik Baehaqi. 2016. Pengembangan Komponen Kompetensi Kewarganegaraan Dalam Buku Teks Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs. *Jurnal Civics*, 13(1): 2016.
- Bea Kurniawaty, Julia. 2022. Penerapan Nilai Pancasila dalam Proses Pembelajaran di Sekolah Dasar. *Jagaddhita: Jurnal Kebhinekaan dan Wawasan Kebangsaan*. 1(2): 24.
- Dwijiyanto, Arik. 2021. Pancasila and Rukun Negara: A Relation of Identity, State, and Nationalism in Indonesia and Malaysia. *Tebuireng Journal of Islamic Studies and Society*, 2(2): 49
- Fee, Lee Yok Fee dan Sarjit S. Gill,. 2008. Rukun Negara Teras Pembinaan Modal Insan: Satu Komentar. *Partanika J. Soc. Sci. & Hum*, 16(1): 111.
- Hajri, Hendra Priazki. 2023. Kajian Komparasi Dinamika Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia dan Malaysia. 2023. *Jurnal Foundasia*, 14(1): 43
- Johari, Hadijah & Dawam M. Rohmatulloh. 2019. Persepsi Terhadap Konsep Rukun Negara Melalui Pengajaran Kursus Pengajian Malaysia. *Persidangan Antar Bangsa Sains Sosial dan Kemanusiaan (Pasak)*.
- Kementrian Pelajaran Malaysia, Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan.
- Rizqullah, Teuku Muharam & Fatma Ulfatum Najicha. 2022. Pengimplementasian Ideologi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2): 2632.
- Widiatama, dkk.2020. Ideologi Pancasila Sebagai Dasar Membangun Negara Hukum Indonesi. *Jurnal USM Law Review*, 3(2): 319.